KEMERDEKAAN PAPUA DAN RELEVANSI REAKSI TIGA NEGARA

Zainuddin Djafar

Abstract

The intentions of Papua's independence from Indonesia by Papua's separatist movements have raised some critical points. This becomes more complicated when there were various reactions from some countries like Australia, New Zealand, and the United State of America. Therefore, this writing is going to discuss at some points, issues such as; (1) Dynamics of Papua's problems; (2) Recent conditions of Papua's Community; and (3) its relations with some international actors from Australia, New Zealand and The US, besides (4) Some pertinent diplomatic actions and options that perhaps should also be carried out by the Indonesian government. Further, some important findings seem important to be raised, for example the fact that Papua is looking for its independence on the basis of its right, cultural background and its history, also the existance of its current reality. Those situations have become more complicated when some countries such as; Australia, New Zealand and the United State of America also have some interests to interfere with Papua's issues and problem. It is recommended for Indonesia to have several policy options that focuses on behalf of Papua people's interests, particularly for having freedom from poverty, but not as an independet state. In order to end any of international pressurse on Papua's case, the Indonesian government however should be firm in stating that Papua's case is merely a domestic issue, and it is wrong for any countries to intervere, and it is in violation of Indonesia's law and also its sovereignty.

Keywords: Papua independence, reactions of three countries

Abstrak

Keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia oleh kelompok separatis di Papua telah mencapai titik kritis. Hal itu bertambah pelik bila memperhatikan reaksi dari beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Berdasarkan hal itu, artikel ini bertujuan mendiskusikan secara khusus persoalan-persoalan sebagai berikut: (1) dinamika persoalan Papua, (2) kondisi terakhir masyarakat Papua; dan (3) hubungannya dengan aktor internasional seperti Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat; selain juga (4) beberapa peluang dan langkah diplomasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, beberapa temuan penting untuk dikemukakan, seperti fakta bahwa Papua berupaya mencapai kemerdekaannya berdasarkan atas hak dan latar belakang budaya dan sejarah serta kenyataan yang berkembang hingga kini. Fakta-fakta tersebut akan menjadi sangat rumit tatkala sejumlah negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat juga memiliki kepentingan untuk terlibat dalam persoalan dan isu Papua. Artikel ini merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk melakukan pilihan sejumlah kebijakan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat Papua; terutama hak untuk terbebas dari kemiskinan, bukan hak untuk menjadi negara merdeka. Untuk mengakhiri tekanan internasional atas kasus Papua, Pemerintah Indonesia harus tegas menyatakan persoalan Papua adalah persoalan domestik yang intervensi terhadapnya merupakan pelanggaran atas hukum dan kedaulatan Indonesia.

Kata kunci: Kemerdekaan Papua, reaksi tiga negara

Latar Belakang

Papua adalah sebuah provinsi yang menempati wilayah Indonesia paling barat. Wilayah ini juga sering disebut sebagai Papua Barat karena sebutan Papua dapat merujuk pada seluruh Pulau Papua, termasuk juga Papua Nugini. Wilayah ini menyumbangkan keunikan tersendiri kepada *Bhinneka Tunggal Ika* Indonesia, terdapat 255

kelompok suku asli di Papua yang memiliki bahasa masing-masing. Suku-suku tersebut antara lain: Ansus, Amungme, Asmat, Ayamaru, Bauzi, Biak, Dani, Empur, Hatam, Iha, Komoro, Mee, Meyakh, Moskona, Nafri, Sentani, Souk, Waropen, Wamesa, Muyu, Tobati, Enggros, Korowai, Fuyu, dan masih banyak lagi. Tidak

¹ Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

hanya keragaman suku yang disumbangkan pada keunikan wajah Indonesia secara keseluruhan, namun tidak dapat dimungkiri lagi bahwa berbagai permasalahan pun dapat dikatakan telah menyumbangkan keunikan tersendiri.

Fokus penulisan ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. (1) Sejauhmana keadaan masyarakat Papua dalam berbagai dinamika permasalahan yang telah terjadi sepanjang sejarah?; (2) Sejauh mana keadaan masyarakat tersebut dalam konteks tuntutan kemerdekaan Papua dari Indonesia yang kembali merebak sejak tahun 2011?; (3) Bagaimana kaitan Papua dengan pihak-pihak internasional, baik dalam kaitannya dengan bantuan maupun kepentingan mereka?; (4) Kemudian, bagaimana kaitan-kaitan tersebut memengaruhi Indonesia secara umum?; (5) Opsi-opsi diplomatik apa saja yang dimiliki Indonesia dalam menghadapi dua hal yang sudah disebutkan sebelumnya: tuntutan kemerdekaan Papua dan bantuan serta kepentingan pihak-pihak internasional?

Dengan mengangkat serta menjawab keempat pertanyaan tersebut, permasalahan yang terjadi di Papua dapat dilihat dari sudut pandang yang cukup komprehensif. Permasalahan dapat ditelaah dari sudut pandang masyarakat di Papua sendiri dan bagaimana mereka mempersepsikan keadaan maupun soal ketidakadilan yang menimpa dirinya. Selain itu, permasalahan dapat juga dilihat dari sudut pandang pemerintah Indonesia dalam menyikapi tuntutan salah satu bagian dari provinsi terbesar Indonesia yang hendak merdeka. Tidak kalah pentingnya, dalam penulisan singkat ini akan terungkap juga pengaruh serta kepentingan yang datang dari pihak-pihak di luar Indonesia, dan terkait dengan tuntutan kemerdekaan Papua.

Permasalahan Dalam Negeri

Permasalahan mengenai keinginan Papua untuk merdeka dari Indonesia kembali merebak pada tahun lalu (2011). Sebagaimana diketahui, permintaan tersebut bukanlah yang pertama kali dilontarkan oleh 'orang-orang' (gerakan separatis) Papua. Papua pernah meminta untuk merdeka dari negara ini, namun selalu berha-

sil dikendalikan oleh pemerintah Indonesia. Walaupun tuntutan Papua untuk merdeka dari Indonesia bukanlah yang pertama kali, sebaiknya pihak-pihak yang berkepentingan di tingkat pemerintah Indonesia tidak boleh lengah dan menganggapnya remeh. Dari sudut pandang masyarakat Papua, alasan-alasan untuk menginginkan kemerdekaan dibagi menjadi empat faktor: hak, budaya, latar belakang sejarah serta realitas yang ada pada saat ini.²

A. Hak

Dalam kaitannya dengan faktor hak, masyarakat Papua merasa bahwa sudah menjadi kebebasan mereka untuk merdeka dari Indonesia karena hak tersebut memang telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menjamin hak-hak kolektif di mana hak penentuan nasib sendiri (the right-to-self-determination) telah ditetapkan. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development – Semua bangsa memiliki hak penentuan nasib sendiri. Atas dasar di mana mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi dan budaya mereka.3 Hal ini dijadikan acuan untuk menyatakan bahwa masyarakat Papua memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, apakah hal tersebut untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia maupun untuk melepaskan diri dari Indonesia dan menjadi negara yang terpisah. Dasar ini cukup kuat karena hukum internasional sangat menjunjung tinggi kebebasan suatu bangsa untuk melakukan hal-hal yang dirasakan akan memperbaiki keadaan bangsa tersebut, termasuk untuk merdeka.

Pada awalnya, alasan rights to self-determination tampak sebagai suatu alasan yang cukup kuat dan akan mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari dunia internasional. Namun, temuan penulis menunjukkan bahwa hak tersebut tidak hanya dapat diinterpretasikan sendiri dengan cara tersebut yang bersifat universal, dan

² Ottis Simopiaref, *Kutipan Karkara: Dasar-Dasar Perjuang-an Kemerdekaan Papua Barat*, dalam http://www.antenna.nl/~fwillems/bi/ic/id/wp/dasar.html.

³ Ibid.



Gambar 1. Peta Indonesia'

otomatis merdeka misalnya. Pada 31 Oktober 2011, Majelis Umum PBB melaporkan melalui press release bernomor GA/SHC/3651 bahwa self-determination is not synonymously with independent statehood. Dengan kata lain, hak untuk menentukan nasib sendiri juga dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Papua tidak harus diselesaikan dengan cara memerdekakan diri dari Indonesia. Intinya, Papua tidak harus menjadi negara merdeka dalam menjalankan haknya untuk menentukan nasibnya sendiri.

B. Budaya

Masyarakat Papua merasakan adanya perbedaan pada ras mereka dibandingkan dengan masyarakat Indonesia di wilayah-wilayah lainnya. Mereka berasal dari rumpun ras Melanesia, dan bukannya Melayu seperti masyarakat Indonesia lainnya. Perbedaan ras inilah yang membuat mereka tidak merasa 'menyatu' dengan rakyat Indonesia lainnya. Terlebih lagi, terdapat suatu asumsi bahwa ada semacam superioritas ras di Indonesia, di mana ras Melayu berada pada kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan

dengan ras Melanesia.5 Walaupun asumsi tersebut menjadi pandangan yang umum di Papua, namun tampaknya tidak berlaku di tempat-tempat lain yang rakyatnya juga bukan berasal dari ras Melayu. Ambil saja contoh Maluku dan NTT. Rakyat pada kedua wilayah tersebut tidak merasakan adanya penindasan oleh satu ras kepada ras yang lain, terutama kepada dirinya yang bukan Melayu. Hal ini dapat dianalisis dengan melihat dua faktor sekaligus. Pertama, Maluku dan NTT sedari awal sudah menjadi daerah yang dijajah oleh Belanda sehingga ketika Indonesia merdeka, mereka tidak lagi melihat perbedaan ras rakyat Indonesia. Hal ini berbeda dengan rakyat di Papua yang diajak masuk ke dalam wilayah Indonesia dan bersatu dengan republik ini. Karena latar belakang yang sudah berbeda tersebut, ras kemudian dapat digunakan untuk mencari-cari perbedaan antara penduduk Papua dengan rakyat Indonesia lainnya. Dengan kata lain, perbedaan ras tersebut digunakan sebagai cara untuk menggariskan pembeda antara Papua dengan Indonesia. Kedua, jika dilihat dari kedudukan geografisnya, Papua terletak dalam posisi yang cukup jauh dari pulau-pulau lainnya, sedangkan jika dibandingkan dengan Maluku dan

^{*}Pusat Studi Indonesia, "Indonesia", dalam Center for East Asian Studies in Northern Illinios University, dalam http://www.seasite.niu.edu/indonesian/budaya_bangsa/tmii/fr_tmii.htm.

⁴ "Right To Self-Determination Not Synonymous with Independent Statehood", Press Release GA/SHC/3651, Fifty-sixth General Assembly Third Committee 27th Meeting (PM), dalam http://www.un.org/News/Press/docs/2001/gashc3651.doc.htm.

⁵ Ottis Simopiaref, op.cit., dalam http://www.antenna.nl/~fwillems/bi/ic/id/wp/dasar.html.

NTT, tidak demikian keadaannya. Hal ini dapat dilihat dari peta yang ada di Gambar 1.

Keberadaan Maluku dan NTT yang lebih dekat dengan pulau lain memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih banyak dengan penduduk yang berbeda ras. Kesempatan ini tiak saja jarang bahkan sulit terjadi di Papua karena letak geografisnya yang relatif lebih jauh. Hal ini berdampak pada sedikitnya interaksi dengan ras lain yang menciptakan ekslusivitas ras Melanesia di antara rakyat Papua.

Lebih jauh, sekalipun ada orang yang tidak berasal dari ras Melanesia yang datang ke Papua, sering kali mereka datang untuk alasan ekonomi dan menduduki posisi-posisi penting maupun jabatan tinggi. Ini menegaskan kesan bahwa ada superioritas ras yang sebelumnya telah disebutkan. Persepsi ini ditegaskan dalam sebuah laporan yang dipublikasikan oleh Voice of America (VoA) bahwa rakyat Papua merasa terancam dengan banyaknya pendatang yang masuk ke dalam wilayah mereka. Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Bambang Darmono, mengatakan bahwa pendatang menempati sebagian besar kabupaten dan kota di Papua.6 Keadaan ini mendorong perilaku penduduk asli untuk memandang pendatang sebagai sebuah ancaman bagi kehidupan mereka. Realisasi yang jelas dari kekhawatiran ini dapat dilihat dari dipindahkannya beberapa ibu kota kabupaten di Papua Barat ketika di wilayah tersebut sangat banyak jumlah pendatangnya. Kembali lagi, hal ini merupakan tanda-tanda adanya sensitivitas atas perihal perasaan ekslusifisme serta perbedaan yang ditegaskan antara rakyat Papua dengan Indonesia secara keseluruhan.

Kondisi tersebut diperkuat karena melihat ketimpangan dari kehidupan rakyat Indonesia. Tampaknya semakin dekat dengan pusat pemerintahan, semakin tinggi kualitas kehidupan rakyat Indonesia. Secara umum mereka yang lebih sejahtera tersebut berasal dari ras Melayu, dan bukan berasal dari ras Melanesia. Dengan demikian, terlihat bahwa secara tidak langsung

adanya diskriminasi yang tidak apat diabaikan antar dua ras yang menduduki wilayah Indonesia tersebut. Inilah yang mendorong masyarakat Papua menuntut kemerdekaan atas dasar latar belakang ras rakyat wilayah tersebut.

Akan tetapi, penulis perlu mengingatkan bahwa Indonesia sebenarnya tidak mengenal superioritas suku bangsa. Tidak ada ras yang berada pada kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ras lainnya. Sebagaimana yang tercantum dalam semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, negara ini ada karena negara yang kaya akan berbagai keragaman, baik itu keragaman budaya, bahasa, maupun sejarah, termasuk pula suku bangsa. Merasa berbeda dari yang lain adalah hal yang wajar terjadi di Indonesia karena rakyat negara ini memang tidak homogen. Ada cukup banyak variasi rakyat dalam bentuk lainnya di Indonesia. Berkaitan dengan alasan Papua hendak merdeka dari Indonesia karena masyarakatnya berasal dari ras Melanesia maka perlu diketahui bahwa ras tersebut juga menempati daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sebagai contoh, masyarakat dengan suku bangsa Melanesia juga menempati wilayah Maluku. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang sebagai bangsa Melanesia tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Papua, melainkan juga oleh saudara-saudara mereka yang mendiami wilayah Maluku. Alasan budaya yang dirasakan jauh berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut kemerdekaan karena negara ini memang merupakan negara yang penuh dengan keragaman. Keberadaan Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia bukanlah suatu 'kutukan' bagi masyarakatnya, melainkan sebagai suatu berkah kekayaan bagi seluruh negara ini.

C. Latar Belakang Sejarah

Telah diakui oleh para pendiri negara ini bahwa Papua memang bukan bekas jajahan Belanda, sebagaimana wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Apabila negara Indonesia hendak didirikan pada saat kemerdekaan lalu, maka yang boleh dimasukkan ke dalam wilayah negara tersebut adalah wilayah-wilayah yang dulunya dijajah oleh Belanda pula. Akan tetapi, perbedaan masa jajahan Belanda di Papua dan wilayah

⁶ Wella Sherlita, "Warga Papua Diimbau agar Tak Anggap Pendatang Sebagai Ancaman ", dalam Voice of America, dalam http://www.voaindonesia.com/content/warga-papua-diimbau-agar-tak-anggap-pendatang-sebagai-ancaman-138457154/104257.html.

lainnya di Papua menjadi hal penting bagi rakyat Papua. Karena terdapat perbedaan dalam masa jajahan maka dipercaya bahwa Indonesia dan Papua bukanlah entitas yang sama. Walaupun wilayah Papua pernah juga dijajah oleh Belanda, namun masa penjajahannya tidak sama dengan Indonesia. Indonesia dijajah selama 350 tahun, sedangkan wilayah Papua hanya dijajah selama 64 tahun (1898–1962).7 Perbedaan ini semakin ditonjolkan ketika Belanda sendiri memang menjanjikan kemerdekaan bagi wilayah Papua. Namun di sisi lain, Belanda dengan tegas ingin mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Perbedaan sikap Belanda ini turut menyumbang keyakinan kepada masyarakat Papua bahwa mereka berbeda dari masyarakat di wilayahwilayah lainnya di Indonesia.

Pada 1 Mei 1963, Indonesia menjadi 'kekuatan kolonial' yang baru di Papua dan kekuasaan tersebut menghadirkan berbagai perubahan.⁸ Pertama, dewan yang telah dibentuk oleh Papua dibubarkan. Kedua, bendera yang rencananya digunakan sebagai bendera nasional Papua dibakar dan dilarang pengibarannya. Ketiga, lagu yang disiapkan sebagai lagu kebangsaan Papua juga dilarang oleh pemerintah Indonesia. Hal serupa juga dilakukan terhadap apa pun yang berkaitan dengan rencana kemerdekaan Papua. Ini merupakan latar belakang sejarah yang dengan sangat kuat melekat di pikiran masyarakat Papua dan tampak sebagai perihal negatif dari Indonesia.

Ingatan pada masa lalu ini menghalangi lancarnya integrasi Papua untuk menjadi bagian dari Indonesia. Ketika masa lalu hal-hal seperti itu berkali-kali diungkitkan kembali oleh masyarakat Papua sebagai argumen mereka, maka pemerintah Indonesia harus mampu memberikan argumen yang jauh lebih kuat untuk meyakinkan mereka. Pemerintah Indonesia harus bisa menjelaskan bahwa mereka akan jauh lebih baik keadaannya apabila berintegrasi dengan Indonesia jika dibandingkan dengan keadaan mereka saat ini maupun apabila berdiri sebagai negara yang merdeka. Argumen untuk kepercayaan tersebut dapat dimulai dari kenyataan bahwa

Indonesia secara keseluruhan adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Ini merupakan suatu kesamaan dengan wilayah dari Papua. Apabila kesamaan dari keadaan alam ini dapat ditonjolkan maka dari sana pemerintah Indonesia dapat menunjukkan niat baik untuk mengelola bersama kekayaan alam tersebut. Indonesia bukanlah suatu negara yang miskin akan sumber daya alamnya yang berniat mendekatkan diri dengan wilayah Papua karena ingin mengeksploitasinya.

Selanjutnya, kepercayaan bahwa Papua memang lebih baik berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat didukung juga oleh peran besar yang bisa diemban oleh Papua itu sendiri. Jika argumen sebelumnya menitikberatkan pada peran Indonesia dalam memberikan hak yang baik bagi Papua maka sebaliknya, argumen ini berkaitan dengan peran besar Papua untuk Indonesia. Papua bukan hanya kantong emas dalam hal sumber daya alamnya (SDA) bagi Indonesia, melainkan sumber bagi pemahaman atas keanekaragaman budaya yang lebih kaya. Mengapa keanekaragaman budaya begitu penting bagi Indonesia? Alasannya adalah karena setiap budaya di segala pelosok Indonesia melahirkan produk-produk yang berbeda-beda. Misalnya, budaya melahirkan tari-tarian untuk upacara maupun hiburan, melahirkan cinderamata yang khas dari budaya tersebut, melahirkan musik, produk kain, pakaian, konteks kuliner, dan lain sebagainya. Selain memiliki makna yang dalam sebagai produk dari budaya yang unik, ini juga menjadi suatu potensi yang kembali lagi dapat memperkaya masyarakat dari budaya-budaya tersebut. Apabila dipromosikan dengan baik maka produk-produk dari budaya tersebut dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Inilah yang harus dijelaskan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua untuk meyakinkan bahwa kepahitan di masa lalu dapat dikompensasikan dengan masa depan yang lebih baik.

D. Realitas

Masyarakat Papua yang menghendaki kemerdekaannya dari Indonesia tampaknya tersimpan dalam pikiran mereka, bahwa mereka adalah bangsa yang telah dijajah lama sejak ada

⁷Ottis Simopiaref, op. cit.

^{8&}quot;History of Netherlands New Guinea (Irian Jaya/West Papua)", dalam http://www.vanderheijden.org/ng/history.html.

kekuatan asing di Papua Barat. Hal tersebut semakin kuat relevansinya dari waktu ke waktu karena munculnya pemahaman terhadap identitas bangsanya sendiri, yakni bangsa yang sama sekali berbeda dari bangsa lain berkaitan dengan Indonesia. Karena itu, masyarakat Papua yang ingin merdeka menciptakan identitas bangsa sebagai segala sesuatu yang bukan Indonesia. Masyarakat Papua merasakan dorongan yang semakin kuat untuk merdeka akibat beberapa hal berikut ini: (1) penindasan brutal, (2) adanya ruang yang semakin luas bagi seseorang untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas serta (3) semakin banyaknya informasi yang dapat diakses mengenai masa depan Papua yang lebih baik, dan tanpa harus bergabung dengan NKRI.99 Adanya konteks ketiga hal tersebut memperluas kesempatan masyarakat Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia. Namun, pada saat yang bersamaan, hal-hal itu juga menjadi kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam negara ini.

Untuk hal pertama, yakni penindasan brutal, harus diakui bahwa kekuatan militer banyak diturunkan di Papua untuk mengamankan keadaan setempat. Namun, kekuatan militer tersebut tidak jarang justru melanggar hak asasi manusia dari masyarakat Papua sendiri. Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat Papua tersebutlah yang menjadikan kehadiran kekuatan militer tidak diinginkan dan dipersepsikan sebagai suatu penindasan terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Ini sesungguhnya suatu cerminan bagi pemerintah Indonesia mengenai tindakan yang telah dilakukan kepada suatu wilayah di dalam negara ini. Suara-suara dari masyarakat Papua ini selayaknya ditanggapi sebagai suatu aspirasi dari rakyat yang pada esensinya menyuarakan suatu ketidakadilan.

Lebih jauh, apabila pemerintah dapat menerima suara protes masyarakat Papua dan bukannya menyangkal adanya kekuatan militer yang merugikan masyarakat setempat maka keadaan tampaknya akan sedikit berbeda. Ada kemungkinan bahwa masyarakat Papua sendiri akan menghargai pemerintah yang mengakui bahwa kekuatan militer pada wilayah Papua merugikan masyarakat setempat, sekalipun

tujuan awalnya adalah untuk mengamankan mereka. Paling tidak, masih ada harapan bahwa mereka masih bisa memiliki dan menumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah Indonesia. Namun, kenyataan yang ada justru tampak terjadi sebaliknya. Penindasan yang dilakukan pada wilayah Papua kerap kali disangkal atau sekadar dianggap pantas dilakukan. Seolah-olah pemerintah Indonesia tidak memiliki hati sama sekali terhadap keadaan yang dialami oleh rakyatnya di wilayah yang jauh di Timur Indonesia tersebut. Selanjutnya, mengenai semakin luasnya ruang untuk mengemukakan pendapat. Hal ini memang dimanfaatkan oleh masyarakat Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, namun tidak berarti bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan respons balik. Kembali lagi masalah mendengarkan masyarakat Papua, pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan ruang publik yang kini begitu terbuka untuk mengkomunikasikan niat baik untuk mengembangkan Papua, dengan asumsi bahwa memang ada keinginan besar untuk hal tersebut. Dengan demikian, ruang publik yang terbuka tersebut dapat dijadikan media bagi komunikasi baik dari masyarakat Papua kepada pemerintah Indonesia untuk menyampaikan keluhan maupun sebaliknya juga dari pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua untuk menjawab keluhan-keluhan tersebut.

Inilah hubungan yang seharusnya dikembangkan terhadap masyarakat Papua untuk membendung keinginan mereka merdeka dari NKRI. Hal ini juga berkaitan dengan poin ketiga, yakni informasi yang semakin mudah diakses mengenai Papua. Kemudahan dalam era abad informasi ini juga harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan rakyatnya di Papua. Jika mereka bisa memanfaatkannya untuk mengeluhkan keadaan yang mendorongnya untuk merdeka maka pemerintah juga seharusnya mampu memanfaatkannya untuk juga melakukan respons balik yang lebih punya nilai simpati, dan bukan dengan cara-cara pemaksaan kehendak yang justru menimbulkan sikap antipati.

Soal-soal yang diungkapkan di atas adalah perihal yang berada sebatas antara masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia. Apabila duduk permasalahan hanya berada pada kedua

⁹ Ottis Simopiaref, op. cit.

belah pihak tersebut maka dapat dikatakan bahwa permasalahannya masih relatif sederhana karena dapat diusahakan penyelesaiaannya secara internal. Namun, sayangnya pada kenyataannya tidak demikian karena keinginan Papua untuk merdeka didukung pula oleh adanya reaksi-reaksi khususnya dari 3 negara dan berbagai pihak dan dalam berbagai bentuk, baik yang tampak terlihat secara nyata maupun terselubung sifatnya.

Reaksi Rakyat 3 Negara

Tidak dapat dielakkan lagi bahwa terdapat banyak pihak yang menginginkan Papua untuk merdeka. Hal ini tentunya suatu hal yang menyakitkan bagi pemerintah Indonesia karena tidak hanya ada tekanan dari dalam wilayah negara ini, tetapi juga reaksi dari pihak-pihak secara eksternal (internasional) yang menempatkan Indonesia baik sebagai pihak yang salah maupun 'tidak bertanggung jawab' atas berbagai keinginan maupun ekspektasi yang melambung kuat dari masyarakat Papua. Berikut adalah dukungan rakyat beberapa negara untuk kemerdekaan Papua secara independen.

A. Australia

Australia adalah negara maju yang paling dekat wilayahnya dengan Papua. Mau tidak mau pengaruh dari negara tersebut menjadi cukup menentukan terkait sikap Indonesia menghadapi tuntutan kemerdekaan 'masyarakat' Papua. Sejak tahun 2006, sebanyak 76,7% dari rakyat Australia mendukung kemerdekaan Papua.10 Persentase tersebut muncul pertama kali setelah Indonesia menunjukkan rasa kesal yang ditujukan kepada Australia karena telah memberikan suaka kepada 42 pengungsi dari Papua. Rakyat Australia secara umum menentang Indonesia yang dianggap telah menutup telinga terhadap suara dari rakyat di Papua. Kembali lagi, permasalahan berada pada pemerintah Indonesia yang tidak mendengarkan suara-suara rakyatnya di wilayah Timur negara ini.

Memperhatikan kondisi tersebut maka tidak heran bahwa hanya 5,5% dari rakyat

Australia yang menentang kemerdekaan Papua dari Indonesia.11 Rakyat Australia yang tidak menunjukkan dukungan maupun tantangan, tampaknya tidak tahu harus mengambil sikap yang bagaimana terhadap soal kemerdekaan Papua tersebut. Namun secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa pandangan umum Australia terhadap tuntutan Papua untuk merdeka adalah dukungan terhadap kemerdekaan Papua secara independen. Berbagai organisasi yang berbasis masyarakat juga telah dibentuk di Australia untuk mendukung kemerdekaan masyarakat Papua dari Indonesia. Pembentukan organisasi pendukung kemerdekaan ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang didukung bukan sekadar hak asasi manusia rakyat Papua yang selama ini telah ditelantarkan oleh pemerintah Indonesia. Lebih spesifik lagi, rakyat Australia terlihat dukungannya untuk memerdekakan Papua dari Indonesia. Hal ini sungguh suatu hal yang tidak dapat ditoleransi oleh pemerintah Indonesia.

Meskipun dukungan rakyat Australia sangat kuat terhadap kemerdekaan Papua, pemerintah Australia terus-menerus menyatakan sikap yang justru sebaliknya. Pemerintah Australia berkali-kali menyatakan bahwa mereka tidak berada pada posisi yang menentang kedaulatan Indonesia dengan mendukung kemerdekaan Papua. Australia mendukung Indonesia untuk menekan tuntutan kemerdekaan Papua. Pesan tersebut berkali-kali disampaikan termasuk sikap pemerintah Australia pada 28 Februari 2012. Pemerintah Australia membantah memiliki keterkaitan dengan suatu forum regional yang mendukung kemerdekaan Papua yang telah dilaksanakan di Canberra pada tanggal tersebut. 12 Sebuah pertemuan telah dilakukan oleh pihak yang menyebut dirinya sebagai International Parliamentarians for West Papua yang mengundang perwakilan dari berbagai negara termasik Australia, Papua Nugini, dan Selandia Baru. 13

Namun pemerintah negara tersebut mengakui bahwa forum tersebut tidak mewakili

¹⁰DéhAoine Meith, "Australians Support West Papua Independence", dalam http://www.indymedia.ie/article/76667?author_name=AP&comment_order=desc&userlanguage=ga&save_prefs=true.

¹¹ *Ibid*.

¹² "Oz Govt Denies Support for Meeting on West. Papua's Independence", dalam, http://www.thejakartaglobe.com/home/oz-govt-denies-support-for-meeting-on-w-papuas-independence/501179.

¹³ *Ibid*.

pandangan dan pendirian resmi dari pemerintah Australia. Australia, dalam hubungan internasionalnya, mendukung integritas teritorial dan nasional Indonesia terhadap Papua. 14 Tidak mungkin Australia berani secara formal mendukung kemerdekaan Papua karena hal tersebut akan melanggar Perjanjian Lombok (Lombok Treaty) yang berlaku antara negaranya dan Indonesia. Perjanjian Lombok itu sendiri adalah sebuah perjanjian keamanan antara Indonesia dan Australia yang mulai berlaku sejak Febuari 2008. 15 Pada perjanjian tersebut, berbagai permasalahan diatur termasuk di antaranya kerja sama pertahanan, inteligen, dan keamanan maritim yang masing-masing telah mendukung eratnya hubungan kedua negara.

Kendatipun Indonesia dapat berbangga diri karena sikapnya didukung oleh negara maju (Australia) yang dekat secara geografis, namun Indonesia tidak boleh lengah. Jelas kalau dikatakan bahwa tidak boleh satu pihak pun yang dapat menganggap remeh suara rakyat, baik itu pemerintah Australia maupun Indonesia. Rakyat Australia merasakan suatu ikatan dengan rakyat di wilayah Papua atas dasar pemenuhan hak untuk determinasi diri. Alasan mengapa rakyat Australia sangat mendukung kemerdekaan Papua, adalah karena banyaknya pelanggaran yang terjadi di tanah tersebut. Pelanggaran terhadap hak asasi rakyat Papua menjadikan Indonesia dalam posisi sebagai pihak-pihak yang membenarkan tindakan-tindakan kriminal di mata rakyat Australia. Meskipun hal tersebut adalah suara dari rakyatnya dan bukan dari pemerintahnya secara resmi, namun siapa yang berani meremehkan suara tersebut? Kekuatan dari rakyat adalah mereka yang dapat menuntut pemerintahnya, dan tuntutan tersebut dapat mengarahkan keputusan yang diambil. Saat ini dapat saja pemerintah masih mengendalikan keputusan resminya demi menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia. Namun, tidak mudah disimpulkan bahwa dukungan dari rakyat Australia terhadap kemerdekaan Papua akan segera mereda. Dukungan tersebut akan terus mengalir dan sangat besar kemungkinannya untuk menguat, seiring dengan semakin kuatnya Indonesia mengambil sikap untuk melakukan halhal yang sebaliknya. Jika pemerintah Australia sampai terpengaruh oleh suara rakyatnya untuk mengambil sikap yang berbeda terhadap kemerdekaan Papua dan dengan berbagai kaitan lainnya maka tidak mudah bagi Indonesia untuk menghapus ataupun menghilangkan berbagai tekanan internasional tersebut.

Apa yang dapat disimpulkan dari reaksi rakyat Australia atas soal kemerdekaan Papua tersebut? Jelas pemerintah Indonesia tidak dapat menggantungkan harapannya kepada pemerintah Australia untuk mendukung niatnya membendung kemerdekaan dari masyarakat Papua. Karena di tingkat domestik Australia sendiri terdapat perpecahan pendapat. Di samping tidak hanya sekadar sebagai suatu perpecahan pendapat, namun pihak yang memiliki pendapat yang berbeda dengan pendirian resmi Australia tampaknya sangat kuat. Dengan demikian, bukannya suatu hal yang mustahil apabila pemerintah lantas dapat dipengaruhi oleh masyarakatnya yang mendukung kemerdekaan Papua. Memang, Australia terikat pada Perjanjian Lombok yang mencegah negara tersebut ikut campur dalam permasalahan di Papua. Namun, apakah setiap perjanjian selalu dipatuhi oleh pihak-pihak yang diikatnya dalam sepanjang masa? Hal tersebut merupakan suatu renungan yang penting dan valid bagi Indonesia.

B. Selandia Baru

Selandia Baru adalah negara yang memiliki rakyat maupun pemerintah dengan sikap terangterangan dalam mendukung kemerdekaan Papua. Pada awalnya, Selandia Baru memiliki sikap yang mendukung Indonesia untuk mempertahankan pemerintahannya di wilayah Papua. Namun, sikap ini tidak bertahan selamanya. Pemerintah Selandia Baru mendukung Belanda dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua pada tahun 1960-an. Politisi, diplomat maupun rakyat Selandia Baru sudah bertekad untuk berkomitmen pada prinsip *self-determination* yang sangat dijunjung tinggi saat itu. ¹⁶ Prinsip

¹⁴ Ihid

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Sikap ini ditujukkan oleh Perdana Menteri Holyoake pada PBB di tahun 1963 bahwa "Solusi yang adil dan berkelanjutan" hanya akan dicapai apabila Papua dibiarkan menerapkan prinsip self-determination, dalam "Annual Report", Department of External Affairs, dalam http://sydney.edu.au/arts/peace_conflict/docs/Papua_Desk_WP_and_New_Zealand_Foreign_Policy.pdf. 31 Maret 1963.

ini disebut-sebut oleh Perdana Menteri Keith Holyoake sebagai dasar yang paling tepat untuk permasalahan yang terjadi di Papua.

Bagi negara ini, Papua sudah merdeka sejak tanggal 1 Desember 1961 ketika Papua lepas dari jajahan Belanda.¹⁷ Hal ini dibuktikan dengan dikibarkannya bendera Bintang Kejora, bendera "kemerdekaan" Papua, pada tanggal 1 Desember 2011 lalu. 18 Pengibaran bendera tersebut dilakukan di Auckland dan Wellington untuk menandakan 50 tahun Papua Barat berdiri sebagai negara yang berdaulat. Pemerintah Selandia Baru memang tidak ingin mengambil sikap yang diam atau mengambil posisi aman dalam kaitan dengan tuntutan kemerdekaan Papua. Russel Norman, salah satu pemimpin New Zealand Green Party, mengatakan bahwa pemerintah negara tersebut harus menghapuskan segala bentuk diam diri terhadap isu Papua ini. 19 Serupa dengan pendapat masyarakat Australia, Selandia mengambil sikap mendukung kemerdekaan Papua karena pelanggaran hak asasi manusia yang banyak terjadi di wilayah tersebut. Merasa iba pada keadaan masyarakat di Papua, rakyat Selandia Baru juga melakukan gerakan solidaritas pada tanggal 1 Desember lalu dengan berjalan sembari mengibarkan bendera Bintang Kejora. Dalam hal ini bagaimana seharusnya Indonesia menyikapi gerakan solidaritas tersebut?

Sikap Selandia Baru yang terang-terangan mengakui kemerdekaan Papua adalah bentuk dari pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Dalam 50 tahun terakhir, Selandia Baru selalu menganggap Papua sebagai negara yang berdaulat dan bukannya bagian integral dari Indonesia. Selandia Baru secara sepihak memilih untuk mengabaikan kedaulatan Indonesia dengan cara tidak mengakui integrasi Papua ke dalam wilayah negara ini. Ini adalah masalah yang serius. Pemerintah Indonesia harus memberi pesan yang kuat kepada Selandia Baru dan dunia internasional, bahwa secara tegas Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia yang

¹⁷"New Zealand Support for Papuans' 50th Anniversary Of Independence Declaration", dalam *Radio New Zealand International*, dalam *http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=64782*.

terintegrasi ke dalam negara ini secara integral. Harus ditekankan pula bahwa tidak ada negara yang boleh menganggap bahwa wilayah tersebut adalah wilayah yang merdeka karena itu melanggar kedaulatan Indonesia. Meskipun parah atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia di Papua dapat diperdebatkan, namun kedaulatan Indonesia tidak boleh dipertanyakan, apalagi diremehkan dengan cara tersebut. Bagaimanapun juga, PBB telah mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebagai negara yang juga merupakan bagian dari PBB, Selandia Baru justru mengabaikan kedaulatan Indonesia melalui aksi-aksi masyarakatnya yang mengibarkan bendera Bintang Kejora. Bendera tersebut saja tidak diakui oleh Indonesia karena Papua masih dianggap sebagai bagian yang menyatu dengan wilayah lainnya di Indonesia. Namun, mengapa Selandia Baru dengan leluasanya dapat mengibarkannya?

C. Amerika Serikat

Indonesia bagi Amerika Serikat adalah sebagai suatu "comprehensive partnership" yang memiliki arti bahwa negara ini dianggap penting untuk dijalin hubungannya dalam berbagai bidang sekaligus (politik, ekonomi serta kerja sama strategis lainnya).20 Negara ini, begitu penting bagi penguasa dunia ini, baik secara bilateral sebagai satu negara yang independen maupun sebagai pemain yang berpengaruh di tingkat regional, multilateral maupun internasional. Pada tingkat regional, Amerika Serikat ingin mendekatkan diri kepada Indonesia untuk membantunya tetap berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, baik dalam diplomasi, perdagangan dan ekonomi, maupun dalam prospek kerja sama strategis human-security umumnya. Itulah alasan mengapa Amerika Serikat senantiasa menjaga jalinan hubungan baiknya dengan Indonesia. Namun, terlepas dari pentingnya hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia, ternyata negara tersebut tidak selamanya memiliki pendirian yang senada dengan pendirian Indonesia sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan sangat jelas dalam kasus tuntutan masyarakat Papua untuk merdeka dari Indonesia.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Alfred Oehlers, "Papua: Time for Firm US Stand", dalam http://the-diplomat.com/asean-beat/2012/02/16/papua-time-for-firm-u-s-stand/.

Kekerasan yang semakin banyak terjadi di wilayah Papua harus diakui telah 'sedikit' merenggangkan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Meningkatnya kejadian yang diwarnai dengan berbagai kekerasan, membuat Amerika Serikat merasa harus memiliki pendirian yang kuat terhadap nasib dari rakyat Papua. Di bawah kepemimpinan Presiden Barrack Obama, Amerika Serikat menyatakan bahwa permasalahan di Papua mengalihkan perhatian mereka dari tujuan utama kerja samanya dengan Indonesia dalam strategi yang disebut "re-balancing" towards the Asia-Pacific.21 Sebagai "frontir" dalam masalah hak asasi manusia, Amerika Serikat selanjutnya merasa memiliki kewajiban untuk membela masyarakat Papua yang telah merasakan berbagai tekanan selama menjadi bagian dari Indonesia. Inilah awal mula dari dukungan kuat Amerika Serikat untuk kemerdekaan Papua. Sikap yang telah diambil oleh pemerintah Amerika Serikat, dan mengarahkan pendirian rakyatnya untuk menentang kekerasan yang terjadi kepada rakyat Papua. Dengan demikian, keputusan Amerika Serikat telah menentukan sikap yang diambil oleh negaranya secara keseluruhan. Namun, dapat dilihat bahwa kekhawatiran Amerika Serikat terhadap keadaan di Papua melebihi perhatian yang terbatas pada penghentian pelanggaran terhadap rakyat Papua. Jika memang perhatiannya hanya untuk menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran hak rakyat Papua, opsi Amerika Serikat untuk mengesampingkan kepercayaan yang telah dibangun dari hubungan bilateral antara keduanya. Namun karena pemerintah Amerika Serikat mengalihkan pendiriannya dengan cukup drastis, dapat dipahami bahwa terdapat inisiatif yang lebih dari sekadar mendukung HAM rakyat Papua.

Tentu, Amerika Serikat menyuarakan kewajiban Indonesia untuk membela hak dari rakyat di Papua. Namun, suara tersebut sedikit membingungkan bagi Indonesia untuk dipahami. Di satu sisi, Amerika Serikat dengan terang-terangan mendukung pemenuhan hak-hak rakyat Papua yang direfleksikan melalui tuntutantuntutan mereka. Dengan demikian, Amerika Serikat mengambil sikap bahwa Indonesia harus

memberikan kemerdekaan bagi rakyat Papua, karena hal itulah yang dituntut oleh mereka. Ini sangat menyakitkan bagi Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, tidak ada negara yang boleh memaksanya untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Masalah separatisme tentu sebuah permasalahan yang oleh tiap negara dianggap sebagai masalah intern. Lebih jauh, pemerintah Amerika Serikat harusnya memahami persoalan Papua dan Indonesia secara konstruktif khususnya, mengingat keterlibatan Amerika dalam hal implementasi program *Local Governance Support Program* (LGSP), pasca-otonomi khusus, 2005–2009.²²

Mengapa Amerika Serikat mendukung separatisme yang diinginkan oleh masyarakat di Papua, ketika hal itu bertolak belakang dengan keinginan Indonesia? Namun di sisi lain, hal yang membuat pendirian Amerika Serika seolah-olah hanya manis di depan saja adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa negara tersebut berada di sisi Indonesia menekan kemerdekaan Papua. Analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa negara tersebut sangat kuat pendiriannya dalam mendukung Indonesia melawan gerakan kemerdekaan Papua.23 Dukungan pemerintah maupun rakyat Amerika Serikat ini senantiasa menjadi tekanan yang besar bagi masyarakat Papua dan diharapkan dapat membendung keinginan mereka untuk merdeka. Meskipun demikian, Amerika Serikat juga senantiasa mengekspresikan kekhawatiran mereka bahwa pelanggaran terhadap hak asasi masyarakat Papua yang sebaiknya diselesaikan secara damai oleh Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat tampaknya ingin menekankan bahwa intervensi mereka hanya sampai pada suatu proses penyelesaian secara damai.

Menteri Pertahanan Amerika Serika, Leon Panetta, mengatakan dalam kunjungannya ke Indonesia pada tahun 2011 bahwa negaranya de-

²² Wawancara dengan Wallynmell Octof Ingratoebon, 10 Maret 2012, penulis skripsi yang berjudul; *Kepentingan Amerika Serikat dalam Implementasi Program LGSP (Local Governance Support Program) di Papua Pasca Otonomi Khusus, 2005–2009*, (Jakarta: FISIP UPDM (B)).

²³ Brian Padden, "US Officials Back Indonesian Stand Against Papua Independence", dalam http://www.voanews.com/eng-lish/news/asia/US-Officials-Back-Indonesian-Stand-Against-Papua-Independence-132526368.html.

²¹ Ibid.

ngan tegas mendukung pendirian Indonesia untuk melawan kemerdekaan Papua.²⁴ Namun sebuah klarifikasi diberikan oleh Kurt Campbell, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, bahwa negaranya masih akan berdiri dengan tegas untuk memperhatikan dan mencoba menyelesaikan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang brutal terhadap hak asasi manusia masyarakat Papua.

Apa yang sebenarnya dapat dilihat dari sikap Amerika Serikat tersebut? Di satu sisi, negara tersebut menyatakan pendiriannya yang mendukung sikap Indonesia untuk menekan tuntutan kemerdekaan dari masyarakat Papua. Di sisi lain, Amerika Serikat juga menunjukkan niatnya untuk berjaga-jaga dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran hak oleh Indonesia. Sungguh suatu hal yang baik apabila negara sebesar Amerika Serikat mendukung pendirian Indonesia dalam hal ini, namun jika melihat sisi lain dari sikap negara tersebut, ada hal yang patut ditakuti. Jika Amerika Serikat memilih untuk mengambil posisi sebagai negara yang "mengawasi" hak asasi masyarakat Papua, bukankah itu berarti bahwa negara tersebut akan melangkahi kedaulatan Indonesia dan mengintervensi ke dalam masalah internal? Menjadi pihak yang mengawasi hak masyarakat Papua menunjukkan bahwa sesungguhnya Amerika Serikat tidak mempercayai kapabilitas Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan yang mekar di wilayahnya sendiri.

Lebih jauh, jika memang Amerika Serikat berada di satu pendirian dengan Indonesia maka seharusnya negara tersebut mengetahui bahwa Indonesia ingin menganggapnya sebagai masalah intern negaranya. Dengan demikian, seharusnya Amerika Serikat tidak perlu ikut campur dan mengambil posisi sebagai "pemerhati" bagi pelanggaran hak masyarakat Papua. Di samping, Amerika Serikat hanya mengulurkan tangan apabila memang diminta oleh Indonesia dan tidak melakukan sesuatu jika memang tidak diinginkan. Bagaimanapun juga, permasalahan di Papua adalah permasalahan dalam negeri. Intinya, tampak sikap ambivalen dari Amerika Serikat yang sepenuhnya tidak mem-back-up keinginan Indonesia membendung tuntutan kemerdekaan Papua. Secara keseluruhan, dinamika reaksi internasional telah menunjukkan suatu pengaruhnya, yang tidak dapat diremehkan dalam prospek penyelesaian permasalahan tuntutan kemerdekaan Papua itu sendiri.

Mengamati uraian maupun ulasan di atas, tentunya pemerintah Indonesia perlu melakukan respons kebijakan yang bersifat tegas, konkret dan strategis sehingga tidak mudah kalau Indonesia selalu dipojokkan atau disalahkan dalam perihal tuntutan kemerdekaan dari pihak masyarakat Papua umumnya.

Peran Prinsip Responsibility to Protect (R2P)

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa harapan Indonesia akan kekuasaannya untuk mengurus keadaan Papua tanpa campur tangan negara lain hanya bertumpu pada prinsip non-interference. Akan tetapi, prinsip tersebut kini mulai dianulir dengan prinsip Responsibility to Protect (R2P). Prinsip ini dimunculkan dengan sebuah konsep fundamental, yakni ketika pemerintah sebuah negara tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar dari sebuah negara modern kepada rakyatnya, maka dunia internasional harus menganggapnya sebagai tanggung jawab mereka.²⁵ Dengan demikian, sebenarnya prinsip non-interference yang telah diagung-agungkan oleh dunia selama ratusan tahun tampaknya sudah tidak sesakral dulu lagi. Di bawah prinsip R2P kedaulatan menjadi suatu kondisionalitas. Ketika negara gagal memenuhi tanggung jawabnya, terlebih ketika ia sadar, negara tersebut akan kehilangan kedaulatannya untuk memberi ruang bagi dunia internasional melakukan intervensi demi memenuhi tanggung jawab yang telah gagal dilakukan negara tersebut.²⁶

Walaupun prinsip tersebut terdengar cukup menjanjikan karena kini memungkinkan reaksi yang lebih cepat dari dunia ketika terjadi pelanggaran HAM berat di sebuah wilayah, namun tidak berarti tidak ada halangan dari implementasinya. Kecurigaan banyak datang dari negara-negara berkembang terhadap kekuatan negara-negara yang lebih maju daripadanya. Sikap tersebut

²⁵ Juan Garrigues, "The Responsibility to Protect: From an Ethical Principle to an Effective Policy", dalam *La realidad de la ayuda, Intermón Oxfam,* dalam *http://www.responsibilityto-protect.org/files/responsibilidad.proteger.pdf,* hlm. 2.

²⁶ Ibid.

bermunculan karena adanya beberapa pertanyaan yang diajukan, seperti: Siapa yang mendefinisikan waktu yang tepat untuk mempraktikkan hak dunia internasional untuk mengintervensi? Intervensi macam apa yang sah untuk digunakan?²⁷ Pertanyaan-pertanyaan ini wajar untuk diajukan mengingat jika suatu negara berpikir secara realis, dalam sebuah intervensi akan selalu ada kepentingan negara yang akan melakukan intervensi tersebut. Kepentingannya sangat bervariasi, dan oleh karena itulah mengapa negara-negara berkembang masih mengkhawatirkan prinsip R2P. Bagaimana jika kepentingan negara yang hendak melakukan intervensi tersebut justru lebih banyak merugikan dirinya? Ini merupakan pertimbangan yang valid.

Jika prinsip R2P dikaitkan dengan keberadaan tiga negara (pemerintah maupun rakyatnya) yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya maka kekhawatiran negara-negara berkembang menjadi relevan. Kekhawatiran tersebut juga berlaku bagi Indonesia. Ian Buruma menuliskan sebuah artikel pada Foreign Policy yang menunjukkan bahwa kekuasaan yang terlalu besar bagi suatu negara terutama Amerika Serikat tidak baik bagi dirinya karena intensi yang baik sekalipun akan direalisasikan dengan cara dan perlakuan yang cenderung kejam.²⁸ Ilusi yang diciptakan bahwa dirinya adalah negara yang besar akan membuatnya bertindak seolah-olah sebagai pihak yang paling penting. Ambil saja contoh Amerika Serikat, ia tidak hanya menegakkan prinsip dan nilai-nilai universal, ia juga menjadikan prinsip dan nilai yang dipercayainya sebagai yang diakui secara internasional. Tidak cukup bagi negara besar untuk menjadi representasi dari apa yang diakui sebagai nilai universal, tetapi mereka harus mempromosikannya secara aktif, dengan kekerasan sekalipun.²⁹ Sekalipun Australia dan Selandia Baru tidak sebesar Amerika Serikat dari segi kekuatannya, namun kecenderungan untuk melihat dirinya sebagai contoh realisasi dari prinsip-prinsip universal terlihat juga pada keduanya.

Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru merupakan negara maju. Mereka mengakui bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling tepat untuk digunakan oleh dunia, dan karena itu mereka menganut sistem tersebut. Ketiganya mengakui pentingnya hak asasi manusia dan oleh karenanya, mereka juga memperhatikan hak-hak asasi manusia di luar wilayah politiknya. Di bawah prinsip non-interference, negara-negara ini dibatasi oleh kedaulatan negara yang dianggap absolut. Namun, di bawah prinsip R2P, mereka justru menemukan justifikasi baru untuk melakukan intervensi atas nama "kemanusiaan" di negara lain. Justru karena ada prinsip ini, mereka bisa mengatakan bahwa keadaan kemanusiaan di suatu negara menjadi tanggung jawab mereka jika terdapat indikasi bahwa negara tersebut tidak sanggup memenuhinya, dan dalam hal sekecil apa pun indikasi tersebut. Dengan demikian, justru bagi Indonesia, prinsip R2P lebih mengancam kedaulatan dirinya jika dikaitkan dengan rakyat Papua. Kapan Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru mendefinisikan pelanggaran berat terhadap HAM, atau atas dasar apa mereka mendefinisikannya, jelas hal tersebut tidak akan dapat dibantah Indonesia. Prinsip R2P ini memungkinkan negara-negara besar tersebut untuk melakukan lebih dari sekadar memperhatikan keadaan HAM rakyat Papua karena mereka dapat mengklaim tanggung jawab tersebut. Ini menjawab pertanyaan mengapa perhatian kepada rakyat Papua bisa dianalisis lebih lanjut sebagai dukungan terhadap kemerdekaan. Jika negara-negara tersebut merasakan bahwa kegagalan Indonesia sudah berlarut-larut dan memberi label "negara yang gagal" dan konteks menjaga kesejahteraan rakyatnya maka solusi untuk melepaskan Papua dari kedaulatan Indonesia dapat saja menjadi solusi yang begitu dipercaya. Kemungkinan tersebut tampaknya tidak dapat dianggap remeh.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ian Buruma, "Imperial Hubris", dalam *Foreign Policy, USA, New York,* November 2011, hlm. 65.

Relevansi Potensi Domestik Papua

Berikut ini adalah beberapa potensi domestik dan perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia.

1. Memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Papua

Beragamnya permasalahan ekonomi dan sosial yang menimpa masyarakat di Papua Barat, membuat pemerintah Indonesia seolah-olah mengesampingkan wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lebih dekat secara geografis dengan pusat pemerintahan (Jakarta). Kesan tersebut sebaiknya tidak diremehkan karena bagaimanapun juga, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan ekonomi rakyatnya di seluruh wilayah NKRI, termasuk kesejahteraan sosialnya.

Jika saat ini masyarakat Papua merasa ditelantarkan karena perekonomian serta kehidupan sosial mereka jauh dari standar kenyamanan maka kemerdekaan mereka bukanlah solusi yang tepat. Dengan pendekatan yang tidak didominasi melalui hanya opsi kekuatan militer, pemerintah Indonesia perlu menyadari masyarakat setempat bahwa permasalahan yang mereka hadapi adalah permasalahan yang dapat diselesaikan melalui perbaikan kesejahteraan sosial. Perbaikan pada keadaan ekonomi dan sosial masyarakat Papua akan mendatangkan kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintah Indonesia. Dengan dilakukannya hal tersebut, masyarakat Papua tidak lagi perlu merasakan bahwa mereka ditelantarkan ataupun dieksploitasi oleh negaranya sendiri. Dengan memperbaiki kesejahteraan masyarakat Papua, mereka akan melihat bahwa semangat untuk merdeka bagi mereka memang tepat adanya, tetapi tidak tepat sasaran. Dengan kata lain, masyarakat Papua tidak perlu merdeka dari Indonesia, tetapi hanya merdeka dari kemiskinan.

2. Indonesia perlu mewaspadai kepentingan serta reaksi dari pihak-pihak internasional agar tidak membahayakan kedaulatan negara

Yang dimaksud dari poin ini adalah pemerintah tetap perlu waspada terhadap kepentingankepentingan pihak-pihak internasional, baik negara maupun organisasi, terhadap Papua. Ramainya dukungan dari 'aktor-aktor' di negaranegara seperi Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru untuk mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia tidak boleh diabaikan. Adanya dukungan-dukungan tersebut menunjukkan dua hal sekaligus.

Pertama, bahwa memang ada kesalahan dari pemerintah Indonesia yang selama ini kurang memperhatikan dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat Papua. Alasan ini yang memunculkan ketidakpercayaan masyarakat Papua sehingga opsi untuk merdeka dari Indonesia sampai terpikir oleh mereka. Selain itu, keadaan ini juga diberi label yang berbeda oleh negara-negara dan organisasi lainnya sebagai 'pelanggaran terhadap hak asasi manusia' untuk memberi kesan yang memberatkan pemerintah Indonesia. Ketika sudah ada pelanggaran hak asasi manusia maka masyarakat setempat akan selalu ditempatkan sebagai korban yang harus diselamatkan dari pihak yang 'jahat', yakni pemerintah dan negara Indonesia secara keseluruhan. Namun, hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi terus-menerus. Indonesia harus dengan tegas menyangkal bahwa yang telah dilakukan pemerintah kepada masyarakat setempat bukanlah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kesalahan karena kurang mampu mengembangkan kesejahteraan sosial masyarakat Papua bukanlah suatu pelanggaran hak asasi, dan terlebih lagi, masih dapat diatasi dengan cara mengembalikan fokus pada pemberian kesejahteraan. Inilah yang harus dilakukan Indonesia berkaitan dengan alasan banyaknya kepentingan dan dukungan dari pihak-pihak di luar negara ini.

Hal kedua yang ditunjukkan dari banyaknya kepentingan dan dukungan tersebut adalah adanya kekayaan yang dapat dilihat di tanah Papua. Jika ditelaah secara logis, Papua menjadi begitu memikat bagi negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru tidak sekadar karena ingin 'menyelamatkan mereka dari pelanggaran hak asasi manusia'. Wilayah Papua Barat Indonesia ini memikat pihak-pihak tersebut karena kekayaan alam yang masih begitu banyak tersimpan di sana. Apabila kekayaan tersebut dikelola oleh negara-negara maju tersebut maka Amerika Serikat, Australia,

dan Selandia Baru, maupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dapat semakin memperkaya diri. Masyarakat Papua memang harus berbangga diri karena wilayah mereka kaya akan potensi kesejahteraan. Namun justru di sanalah masyarakat setempat maupun pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai wilayah yang begitu kaya akan potensi alamnya menjadi ladang yang dieksploitasi oleh pihak-pihak yang sudah sedari dulu menunggu kesempatan tersebut.

Melihat kedua hal yang dapat dianalisis dari kepentingan pihak-pihak internasional tersebut, Indonesia selanjutnya perlu mengatasi kepentingan dan dukungan mereka. Pemerintah Indonesia harus menyadari bahwa intensi yang begitu jelas terlihat dari tindakan dan dukungan terhadap kemerdekaan Papua akan semakin membahayakan kedaulatan Indonesia-apabila pihak-pihak tersebut berinteraksi secara langsung dengan Papua. Saat ini, negara-negara yang mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia membentuk interaksi secara langsung dengan masyarakat Papua. Perlu disadari bahwa interaksi tersebut tidak hanya dilakukan untuk mendukung masyarakat Papua untuk mendapatkan pemenuhan hak asasi mereka. Hal tersebut juga semakin memperkuat keingingan masyarakat setempat untuk merdeka. Diinginkan maupun tidak, hal ini memang terjadi dan perlu diwaspadai agar masyarakat Papua tidak 'dibutakan' oleh iming-iming gemilangnya menjadi negara yang merdeka.

Secara keseluruhan, Indonesia harus menegaskan bahwa permasalahan ini adalah masalah dalam negeri dan kepentingan serta intervensi pihak lain adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara ini. Bagaimanapun keadaan yang menimpa Papua, wilayah tersebut masih berada di dalam negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia masih memiliki kedaulatan atas Papua. Kedaulatan bukan hanya sebuah jargon yang tidak memiliki kekuatan hukum. Kedaulatan atas Papua harus dipraktikkan dan dilindungi oleh Indonesia dengan cara menegaskan bahwa tidak boleh ada negara maupun organisasi yang berada di luar Indonesia yang dapat mendikte tindakan Indonesia berkaitan dengan Papua. Terlebih lagi, Indonesia harus menegaskan bahwa tidak ada pihak asing yang boleh melanggar kedaulatan Indonesia dengan secara langsung berhubungan dengan Papua untuk mendukung kemerdekaannya. Pesan ini penting untuk disampaikan kepada dunia internasional. Dalam penyampaiannya, bidang diplomasi Indonesia memiliki beban yang cukup besar. Para diplomat Indonesia maupun individu-individu lainnya yang berperan penting dalam bidang hubungan internasional harus menyampaikan bahwa kedaulatan Indonesia terhadap Papua masih berlaku dan tidak boleh dilanggar sebagaimana yang ditunjukkan oleh negara-negara yang secara terang-terangan mendukung kemerdekaan wilayah tersebut.

Hal ini berkaitan dengan dua poin yang sudah dijabarkan sebelumnya. Dalam diplomasinya, Indonesia perlu melakukan klarifikasi bahwa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Papua bukanlah sebuah permasalahan yang perlu diatasi dengan kemerdekaan. Yang perlu diprioritaskan oleh masyarakat Papua adalah kemerdekaan dari kemiskinan, bukan kemerdekaan dari Indonesia. Pesan ini harus dengan tegas disampaikan kepada dunia internasional, untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sendiri mampu mengidentifikasi permasalahan yang sesungguhnya. Secara langsung, dengan menyampaikan pesan tersebut dengan tegas, dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia mampu mengakui kesalahannya karena belum berhasil mendatangkan kesejahteraan sosial kepada rakyatnya di wilayah tersebut. Tampaknya, pemerintah Indonesia mampu mengidentifikasi permasalahan, dan juga mengakui kesalahannya, yang selanjutnya akan mendorong munculnya pemahaman bahwa Indonesia masih menganggap Papua sebagai bagian dari Indonesia yang luas ini.

Selain kepada dunia internasional, pemerintah Indonesia juga harus menyakinkan masyarakat Papua bahwa kesalahan tersebut memang berada di tangan 'oknum-oknum' termasuk 'aparat tertentu' dari pemerintah. Tidak hanya itu, harus juga dipastikan bahwa masyarakat Papua diberitahu bahwa ada niat kuat dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi kesalahan yang telah dibuatnya, dan Paskalis Kossay lebih jauh menekankan, "utamakan komunikasi konstruktif dengan rakyat Papua melalui lembaga-lembaga resmi pemerintahan di daerah (Gubernur, DPRP,

dan MRP)". ³⁰ Komunikasi timbal balik amat penting, dan tidak relevan lagi hanya sekadar memungkiri bahwa pemerintah tidak pernah melakukan kesalahan dalam kaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat Papua, dan konflik pendapat hanya akan memperkuat keinginan mereka untuk merdeka dari Indonesia dan bukannya merdeka dari kemiskinan. Selain itu, pendekatan ini diharapkan juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Papua bahwa mereka masih masuk ke dalam prioritas Indonesia dan bukan untuk ditelantarkan. ³¹

Peran pihak-pihak nonpemerintah seperti lembaga swadaya rakyat (LSM) dapat dipertimbangkan sebagai penguat usaha pemerintah Indonesia dalam mengatasi keadaan di Papua. Akan tetapi, untuk hal ini perlu diketahui bahwa LSM hanya dapat ikut berpartisipasi sebatas mendukung pemerintah. Mereka tidak dapat menggantikan peran pemerintah dalam menghadapi permasalahan ini. Alasannya ada dua. Pertama, isu keadaan rakyat Papua serta tuntutan untuk merdeka merupakan isu yang sangat sensitif. Harus ada pendekatan yang mempertimbangkan segi kedaulatan negara. Pemerintah dapat konsisten dengan kedaulatan negara ini karena ada ikatan dengan kepentingan politik negara ini. Akan tetapi, salah satu ciri dari LSM adalah mereka dapat berbeda maupun tidak sesuai dengan kepentingan politik negara. Jika permasalahan Papua ini diberikan sepenuhnya kepada badan yang tidak berkaitan dengan pemerintah, ditakutkan karena tidak terikat pada kepentingan politik maka tidak terikat juga dengan kepentingan kedaulatan negara. Hal ini akan membahayakan Indonesia karena isu yang begitu sensitif diatasi oleh pihak yang tidak terkait dengan titik permasalahannya. Kedua, pemerintah Indonesia sendiri tidak ingin permasalahan ini dicampuri oleh terlalu banyak pihak. Untuk mempermudah penyelesaian masalah tuntutan kemerdekaan ini, pemerintah Indonesia perlu diberi ruang untuk menyelesaikan masalahnya secara formal. LSM maupun badan-badan nonpemerintah lainnya dapat menjadi halangan bagi pemerintah. Hal

ini tentu tidak diinginkan untuk terjadi. Oleh karena itu, pada akhirnya upaya apa pun yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah Papua ini akan lebih perlu dilakukan oleh pemerintah. Badan-badan nonpemerintah seperti LSM hanya akan menjadi upaya tambahan yang membantu saja, tapi bukan sebagai pelaku utama. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa relevansi potensi domestik Papua harus ditangani oleh pemerintah Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Penutup dan Refleksi

Berdasarkan uraian tentang relevansi potensi domestik Papua di atas, tampak masih terbuka banyak koridor dan opsi bagi kebijakan diplomasi RI dalam menghadapi reaksi-reaksi internasional atas kasus Papua Merdeka. Kalau diperhatikan dengan hal-hal yang penting untuk diperhitungkan bagi pelaksanaan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif serta sekaligus menghadapi berbagai reaksi dari 3 negara khususnya (Australia, Selandia Baru, maupun Amerika Serikat) maka konteks bahasan di atas dapat menjadi bahan penting bagi diplomasi RI dengan pihak-pihak dari negara lain. Ini sekaligus Indonesia dapat menempatkan posisinya secara tepat dalam kasus keinginan pihak-pihak di Papua untuk merdeka dari Indonesia. Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankan Papua Barat sebagai bagian dari wilayah NKRI, tampaknya sah-sah saja. Hanya secara teoritis memang politik luar negeri merupakan pencerminan dari apa yang menjadi keinginan suatu negara dari sisi dan konteks domestiknya (prinsip negara, ideologi, kepentingan nasional, demografi politik, kondisi ekonominya, dll.).³² Di samping itu, politik luar negeri haruslah bersifat strategis dalam kebijakannya menghadapi pihakpihak asing yang mungkin ada upaya merongrong kedaulatan RI. Hakikat dimensi politik luar negeri tersebut menjadi demikian penting dan prasyarat bagi NKRI, baik bagi kepentingan ekonomipolitiknya maupun politik-keamanannya yang bersifat strategis.³³

³⁰ Paskalis Kossay, *Konflik Papua, Akar Masalah dan Solusi,* (Jakarta: Penerbit Tollelegi, 2011), hlm. 161–170.

³¹ Al Araf, et al. Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan Terhadap Kondisi HAM di Papua. (Jakarta: Imparsial, 2011), Bab Introduksi, hlm. 1–15.

³² James N. Rosenau, *The Study of World Politics, Theoretical and Methodological Challenger Vol.I,* (London, UK, Routlegde, 2006), hlm. 1–33.

³³ Zainudin Djafar, Hakikat Dimensi Strategis Politik Luar

Namun kemampuan suatu negara untuk dapat mengklaim 'secara individual' bahwa konteks politik luar negeri yang berjalan selama ini sudah tepat maupun strategis sifatnya karena mendukung berbagai aspirasi yang solid serta kuat akan kondisi objektifnya, tampaknya bukanlah sesuatu yang dapat eksis secara otomatis dan tanpa gangguan dari pihak-pihak lainnya (aktor lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri).³⁴ Franklin B. Weinstein lebih jauh dalam pengamatannya bahwa cukup banyak elite di pemerintahan, baik di era Sukarno maupun Suharto, tiba-tiba tersinggung atau marah besar hanya karena kritik maupun sorotan dari pihakpihak di luar Indonesia yang melakukan penilaian yang tajam dalam hal utang, dan lain-lain —tanpa diikuti dengan suatu evaluasi yang mendalam, serta akurat.35 Poin ini sekaligus bermaksud menjelaskan dan menekankan lebih jauh bahwa berbagai potensi domestik di atas tidak otomatis dapat bertahan secara kuat, sah, dan kredibel, selama pihak-pihak yang berada di ujung tombak diplomasi (para staf diplomat Kemlu RI) tidak melakukan evaluasi kembali yang sifatnya terusmenerus memahami potensi 'berbagai ekspektasi baru' dalam hal kasus Papua Merdeka tersebut. Dalam hal ini jelas tampaknya ada 2 aktor penting (dalam negeri dan internasional) yang sampai kini (Maret 2012) 'masih' melakukan kritisisasi maupun menggugat akan relevannya kasus Papua Merdeka dari Indonesia dan menjadi perwujudan konkret.

Dalam hal itu, bahasan soal *up-dating* perkembangan diplomasi yang dilakukan oleh berbagai pihak di Kemlu RI, tampaknya memang perlu dipantau secara cermat sehingga konteks bahasan atas kasus Papua Merdeka maupun refleksi apa yang penting dan menjadi pelajaran bagi Indonesia umumnya perlu diperhitungkan secara berimbang. Dari hasil pertemuan dan wawancara mendalam dengan Foster Gultom³⁶

yang sebelumnya banyak aktif dan langsung menangani isu-isu terkait dengan soal Papua Merdeka (kini Sekretaris Dirjen Kerja Sama ASEAN, Kemlu RI) menekankan berikut ini.

Bahwa kami melihat khususnya kasus Papua Merdeka dari sisi individual engagement, yaitu dapat dikatakan hal tersebut disebabkan muncul dan diungkitnya kembali soal Pepera, kemerdekaan Papua, dan sebagainya adalah ambisi dan keinginan kuat yang bersifat individual dari tokoh-tokoh Papua, baik yang datang dari sisi internal Papua maupun mereka yang simpati pada Papua dan datang serta berada di negara-negara lainnya (di luar Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, juga ada individu-individu dari Belanda maupun Inggris). Kontak, dialog, maupun perdebatan pada mereka terus dilakukan, dan sifatnya bahwa soal Papua bukan lagi terbatas pada isu kemerdekaannya semata-mata, dan hal itu tidak dapat digugat lagi oleh siapa pun bagi mereka dari luar Indonesia'.

Khususnya opsi pilihan tersebut tampaknya masuk akal, mengingat diplomasi Indonesia saat ini dan beberapa tahun terakhir ini haruslah realistis. Konteks tingkat pendapatan nasional rakyat Indonesia yang masih terbatas (1.880 dolar AS, data September 2011, The ASIAN Competitiveness Institute, Singapura), begitu pula dengan cadangan devisa Indonesia yang masih berada di tingkat 125-35 miliar dolar AS (akhir 2011) - bukanlah suatu hal yang ideal bagi suatu opsi-opsi diplomasi yang terbuka dan amat bebas serta terus-menerus mengakomodasi banyaknya wacana maupun tuntutan dari berbagai pihak atas kasus 'Kemerdekaan Papua'. Pemerintah Indonesia, dan khususnya dengan apa yang menjadi penekanan dari pandangan Foster Gultom; 'kita harus benar-benar efektif, dan perlu prioritas yang sesuai dengan konstelasi kemampuan dan kapasitas dari anggaran yang ada'.37 Secara tidak langsung, hal ini dibenarkan oleh Than Khee Giap, Vice Director of The Asian Competitiveness Institute, Singapore; 'bahwa diplomasi Singapura di tingkat dunia jauh berkembang dengan amat dinamik karena

Negeri Indonesia, Pidato Ilmiah, Disampaikan pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap FISIP UI, Depok, 28 Juli 2010.

³⁴ Fanklin, B. Weinstein, *Indonesian Foreign Policy and The Dilemma of Dependence From Sukarno to Suharto*, (Jakarta Kuala Lumpur, Malaysia Equinox Publishing, 2007), Bab Introduksi, hlm. 1–20.

³⁵ Franklin B. Weinstein, op. cit., Bab Introduksi.

³⁶ Wawancara Mendalam dengan Foster Gultom, di Kemlu RI,

Jakarta, 21 Maret 2012, pukul 10.00-12.00.

³⁷ Ibid.

dukungan *Gross National Income* (GNI) yang amat besar (US\$37.000, data September 2011).³⁸

Di samping itu, kalau dikatakan juga ada kepentingan dari 3 negara (Australia, Selandia Baru, maupun Amerika Serikat) atas isu-isu di sekitar kasus Papua Merdeka tersebut maka Foster lebih jauh melihat kepentingan-kepentingan tersebut bersifat reaksi dan terbatas pada berbagai isu maupun ekses yang muncul karena masih ada gangguan keamanan yang bersifat kontak senjata, pengibaran bendera Bintang Kejora, dan lainlain. Jadi, reaksi-reaksi tersebut bersifat kasuistis, dan tidak dapat dikatakan khusus menyangkut perlunya pemerintah Indonesia membahas secara khusus soal Papua Merdeka. Kalaupun ada hal-hal yang bersifat terselubung dan utamanya datang dari 3 negara tersebut (Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat), menyangkut ambisi mereka untuk juga menikmati kekayaan alam (SDA) Papua Barat, jelas pihak-pihak di Kemlu akan langsung menanggapinya (secara proaktif, dan tidak dibenarkan, serta tidak dapat didiamkan begitu saja) terhadap pernyataan-pernyataan resmi yang datang dari pemerintahan negaranegara tersebut. Hal ini diperkuat pula oleh Kiki Tjahjo Kusprabowo; yang juga pada intinya menekankan bahwa para pendukung Indonesia dalam hal integritasnya dengan wilayah NKRI juga ada, dan cukup potensial serta berada di Australia.39

Lebih jauh, Dirjen Foster Gultom tampaknya sependapat dengan hal-hal apa yang dirisaukan oleh penulis, yaitu soal dinamika baru atas ekspektasi Papua Merdeka tidak boleh diremehkan, selama pihak-pihak di Indonesia (pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun TNI dan Polri) belum optimal melakukan pembenahan maupun reformasi di seluruh bidang yang langsung terkait dengan pembangunan di tanah Papua khususnya. Kalau dianalisis lebih jauh dari pandangan-pandangan tersebut, penulis sekaligus juga dapat menyimpulkan bahwa kemerdekaan Papua bukanlah suatu ancaman yang setiap saat

akan diikuti oleh tekanan maupun intervensi internasional, baik dari 1 atau 3 negara sekaligus (Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat).

Papua dan dinamikanya memang tampak demikian unik, dan persoalannya tidak mungkin diatasi segera maupun seperti 'secepat membalikkan tangan', dan bukan hanya karena persoalan waktu saja. Akan tetapi, lebih dari itu memang harus ada kemauan politik yang kuat dari 3 komponen domestik tersebut (pusat, daerah, dan TNI serta Polri), bahwa reformasi atas seluruh kehidupan bangsa di Papua harus berjalan, baik secara bertahap maupun mempunyai bukti konkret atas konteks positifnya. Ini berarti bahwa akhirnya dari masyarakat di Papua sendiri yang akan berbicara pada dunia internasional, bahwa tidak relevan lagi bagi siapa pun untuk membicarakan soal kemerdekaannya yang sifatnya terpisah dari NKRI. Kalau seandainya hal tersebut sampai terjadi dan benar-benar menjadi kenyataan maka reaksi dari 3 negara khususnya (Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat) menjadi tidak relevan dalam perihal kasus Papua Merdeka dari Indonesia.

Daftar Pustaka

- Araf, Al et al. 2011. Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua. Jakarta: Imparsial.
- B. Franklin, Weinstein. 2007. *Indonesian Foreign Policy and The Dilemma of Dependence From Sukarno to Suharto*. Jakarta Kuala Lumpur, Malaysia: Equinox Publishing.
- Djafar, Zainuddin. 2010. *Hakikat Dimensi Strategis Politik Luar Negeri Indonesia*, Pidato Ilmiah, disampaikan pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap FISIP UI, Depok, 28 Juli 2010.
- Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Papua, "Sekilas Papua", dalam Situs Resmi Pemerintah Provinsi Papua, http://www.papua.go.id/.
- "History of Netherlands New Guinea (Irian Jaya/West Papua)", dalam http://www.vanderheijden.org/ng/history.html.
- Kossay, Paskalis. 2011. Konflik Papua, Akar Masalah dan Solusi. Jakarta: Penerbit Tollelegi.
- Meith, DéhAoine, "Australians Support West Papua independence", diakses dari http://www.indymedia.ie/ article/76667?author_name=AP&comment_

³⁸ Wawancara mendalam dengan Dr. Than Khee Giap, *Vice-Director of the Asian Competitivenss Institute*, Singapore, 6 Oktober 2011, pukul 10.00–12.00.

³⁹ Kiki Tjahyo Kusprabowo (Kepala Bagian Data dan Kertas Kerja, SekDitjen Kerja sama ASEAN), *Komentar Langsung dan pernah bermukim cukup lama di Australia*, 21 Maret 2012, Kemlu RI, Jakarta.

- order=desc&userlanguage=ga&save_prefs=true.
- N. Rosenau, James. 2006. The Study of World Politics, Theoretical and Methodological Challenger Vol.I. London, UK: Routlegde,
- "New Zealand Support for Papuans' 50th Anniversary of Independence Declaration", dalam Radio New Zealand International, dalam http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=64782.
- "Oz Govt Denies Support for Meeting on West Papua's Independence", dalam http://www.thejakarta-globe.com/home/oz-govt-denies-support-for-meeting-on-w-papuas-independence/501179
- Oehlers, Alfred. "Papua: Time for Firm US Stand", diakses dari http://the-diplomat.com/asean-beat/2012/02/16/papua-time-for-firm-u-s-stand/.
- Padden, Brian. "US Officials Back Indonesian Stand Against Papua Independence", diakses dari http://www.voanews.com/english/news/asia/US-Officials-Back-Indonesian-Stand-Against-Papua-Independence-132526368.html "Right To Self-Determination Not Synonymous With Independent Statehood", Press ReleaseGA/SHC/3651, Fifty-sixth General Assembly Third Committee 27th Meeting (PM), dalam http://www.un.org/News/Press/docs/2001/gashc3651.doc.htm.
- Pusat Studi Indonesia, "Indonesia", dalam Center for East Asian Studies in Northern Illinios University, dalam http://www.seasite.niu.edu/indonesian/budaya bangsa/tmii/fr tmii.htm.

- Sherlita, Wella, "Warga Papua Diimbau agar Tak Anggap Pendatang Sebagai Ancaman", dalam Voice of America, dalam http://www.voaindonesia.com/content/warga-papua-diimbauagar-tak-anggap-pendatang-sebagai-ancaman-138457154/104257.html.
- "Sekilas Papua", dalam Situs Resmi Pemerintah Provinsi Papua, dalam http://www.papua.go.id/.
- Suryawan, I Ngurah (Ed.). 2011. Tanah Papua di Garis Batas: Perspektif, Refleksi dan Tantangan. Malang: Setara Press.
- Simopiaref, Ottis. Kutipan Karkara: Dasar-Dasar Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat, dalam http://www.antenna.nl/~fwillems/bi/ic/id/wp/ dasar.html
- Wawancara dengan Foster Gultom, Sekretaris Dirjen Kerja sama ASEAN, Kemlu RI, Jakarta, 21 Maret 2012, pukul 10.00–11.00.
- Wawancara dengan Kiki Tjahyo Kusprabowo, Kepala Bagian Data dan Kertas Kerja, SekDitjen Kerja sama ASEAN, Kemlu RI, Jakarta, 21 Maret 2012, pukul 11.00–11.30,
- Wawancara dengan Khee Giap Than, *Vice-Director of the Asian Competitivenss Institute*, Singapore, National University of Singapore, 6 Oktober 2011, pukul 10.00–12.00.
- Wawancara dengan Wallynmell Octof Ingratoebon, 10
 Maret 2012, yang bersangkutan adalah penulis skripsi yang berjudul Kepentingan Amerika
 Serikat dalam Implementasi Program LGSP
 (Local Governance Support Program) di Papua
 Pasca Otonomi Khusus, 2005–2009, (Jakarta:
 FISIP UPDM (B)).